

Sentil Penguasa, SBY: Jika Tidak Bisa Baik, Jangan Jadi Buruk

JAKARTA (IM) – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyentil para pemegang kekuasaan melalui kicauannya di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, SBY membagi tiga golongan manusia.

“Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral & lebih beradab. Ada 3 golongan manusia, yaitu ‘the good’, ‘the bad’ & ‘the ugly’. Kalau tidak bisa menjadi ‘the good’ janganlah menjadi ‘the ugly’.” *SBY*,” tulis SBY, dikutip Senin (1/2).

Namun, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini tidak menyebutkan secara gamblang pihak mana yang sebenarnya dia maksud dalam unggahan tersebut. Hal ini pun membuat netizen bertanya serta mengomentari cuitan SBY tersebut.

“Trus The Bad-nya piye pak?,” ujar @umardhan

Sementara itu, ada pula netizen yang mendoakan Presiden keenam Republik Indonesia ini agar selalu diberikan kesehatan.

“Pak, semoga sehat selalu amiiin,” tulis akun @SaniKur-nia5. ● han

Zulhas Usulkan Diberlakukan Lockdown Akhir Pekan

JAKARTA (IM) - Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan meminta pemerintah memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Indonesia yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan kebijakan yang ada saat ini. Bahkan diusulkannya dilakukan Lockdown Akhir Pekan.

Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan saat disinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang tidak efektifnya kebijakan PPKM.

“Fraksi saya sudah menyampaikan, kita perlu akhir pekan ada lockdown,” kata pria yang akrab disapa Zulhas, di ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2).

Apalagi, kata dia, saat ini kenaikan angka kasus Covid-19 menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Bahkan, Wakil Ketua MPR itu menyebut virus Covid-19 juga telah menyerang orang terdekatnya.

“Saya sendiri sudah tiga keluarga, satu meninggal, sekarang (ada) lagi dirawat (tapi) sudah agak pulih lumayan, jadi memang nyata. Staf saya dua, ajudan saya dua, sopir sudah kena, semua sudah hampir,” tuturnya.

Oleh karena itu, Zulhas berharap ada keseriusan pemerintah maupun masyarakat dalam menanggapi keberadaan virus Covid-19 ini. Dia meminta juga kepada pemerintah agar terus melakukan evaluasi dari setiap kebijakan yang sedang berjalan.

“Jadi memang ini luar biasa. Jangan dianggap ini sudah bagus. Bahkan, sekarang ini bertambah berat,” pungkasnya. ● han

Kemendagri Ganti 3.549 KK Korban Gempa di Sulawesi Barat

JAKARTA (IM) - Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) masih melanjutkan layanan penggantian dokumen e-KTP dan kartu keluarga bagi korban bencana gempa di Sulawesi Barat.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, hingga 31 Januari 2020 pihaknya sudah mengganti sebanyak 3.549 kartu keluarga (KK).

“Ini rutin dilakukan Dukcapil setiap ada bencana kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen warga hilang rusak tersebut dengan gratis,” kata Zudan dilansir dari laman resmi Kemendagri, Senin (1/2).

Selain itu, Dukcapil juga melayani penerbitan akta kematian bagi warga setempat

yang meninggal akibat gempa di daerah tersebut. Adapun Dukcapil telah menerbitkan 72 akta kematian yang terdiri dari 53 warga Mamuju, 13 Majene, satu Mamuju Tengah, satu Pasangkayu, dan empat warga non Sulawesi Barat.

Ketua Tim Jemput Bola Ditjen Dukcapil Kemendagri Asep Firdaus mengatakan, untuk warga non Sulawesi Barat, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil daerah asal. Koordinasi itu dimaksudkan agar korban bencana yang meninggal bisa segera diterbitkan akta kematiannya secara elektronik.

“Lalu kami koordinasikan juga agar segera dikirimkan file berbentuk PDF untuk dapat diserahkan kepada keluarga korban di Sulawesi Barat,” ujar Asep. ● mei



IDN/ANTARA

RAPAT KERJA KOMISI IX DENGAN MENKES

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyapa anggota dewan sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2). Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional tahun 2021-2024 dan penjelasan terkait garis besar anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2021.

Anggaran Dianggap Belum Rinci, DPR Tunda Rapat dengan Kemenkes

JAKARTA (IM) - Komisi IX DPR RI menunda rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Sejumlah anggota Komisi IX di DPR menilai, garis besar anggaran Kementerian Kesehatan untuk tahun 2021 yang dipaparkan Budi belum rinci.

“Saya sependapat ya untuk menghentikan rapat dan memperbaiki paparan yang lebih jelas dan road map dan desain anggaran yang akan digunakan dalam reformasi dunia kesehatan 2021,” kata Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher dalam rapat yang disiarkan akun Facebook Komisi IX, Senin (1/2). B

Netty menilai, paparan anggaran Kementerian Kesehatan tidak ada yang baru. Padahal, ia berharap, dalam rapat kali ini Budi dapat memaparkan peta jalan anggaran Kemenkes 2021 secara komprehensif. Senada dengan itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo mengusulkan agar rapat kerja lebih fokus pada postur anggaran 2021 karena lebih mendesak untuk penanganan Covid-19.

“Nah untuk strategi pembangunan lima tahun ke depan politik kesehatan nanti dulu lah, kalau dua-duanya enggak akan nyambung, enggak cukup waktunya,” kata Rahmad.

Menanggapi sanggahan Anggota Komisi IX DPR, Budi mengatakan, anggaran program-program tambahan dalam penanganan Covid-19 belum final. Anggaran tersebut, kata dia, masih dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/ lembaga lainnya.

Wakil Ketua Komisi IX Anshory Siregar selaku pimpinan rapat memutuskan untuk menunda rapat kerja sesuai masukan para anggota Komisi IX. “Baik, bapak-bapak rapat kita jams sampai besok (Selasa) jam 10.00 WIB,” katanya. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



Tolak Revisi UU Pemilu, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten

Pengamat mengatakan, sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu dan mengatakan tidak ada penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2022-2023, menunjukkan sikap tidak konsisten.

JAKARTA (IM) – Banyak pihak mendesak agar Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) direvisi, tapi ditolak pemerintah meski sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Alasannya, UU tersebut masih mengatur rangkaian pemilu di Indonesia hingga 2024.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan hal itu untuk menanggapi analisis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang mengatakan, argumentasi dan sikap pemerintah yang menolak revisi di luar nalar logika berfikir, dan terlihat sangat tidak konsisten dengan argu-

men yang justru keluar dari pemerintah sendiri terutama saat publik meminta pilkada serentak 2020 ditunda.

Saat itu, Pemerintah bersikukuh tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 dengan berbagai argumentasi dan alasan di antaranya untuk menjaga hak konstitusi rakyat untuk dipilih dan memilih. Kemudian, alasan kuat pemerintah tidak mau ada pelaksanaan tugas (plt) yang menjabat secara bersamaan di 270 wilayah, plt tidak boleh mengambil kebijakan strategis karena situasi pandemi yang mengharuskan pejabat daerah mengambil kebijakan strategis, kemudian alasan pilkada bisa kerek ekonomi, menjadi stimulus ekonomi, pilkada menggerakkan ekonomi karena perputaran

duitnya besar dan berbagai macam argumen lainnya.

“Menurut saya pemerintah sedang dijangkiti penyakit amnesia, mengapa dengan begitu cepat melupakan argumentasi yang pernah mereka gunakan untuk tetap ngotot melaksanakan pilkada tahun lalu?” tegas Pangi dalam keterangannya, Senin (1/2).

Pangi pun mempertanyakan argumen yang sama, mengapa tidak dipakai kembali untuk tetap konsisten melakukan normalisasi trayek pilkada serentak 2022 dan 2023?

“Bagaimana mungkin secara akal sehat, common sense pemerintah mendukung dan memberikan sinyal pilkada serentak hanya di tahun 2024, tidak ada penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2022-2023. Itu artinya, akan ada lebih kurang 272 kepala daerah plt? Ini yang merusak kualitas demokrasi, disharmoni, disorder,” katanya.S

Menurutnya, prasyarat negara demokratis yakni terjadi pertukaran elite berkuasa (kepala daerah) secara reguler.

Pelapor Abu Janda Diteror, LPSK Persilakan Ajukan Perlindungan

JAKARTA (IM) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempersilakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengajukan perlindungan setelah mendapatkan teror dari orang tak dikenal.

Haris mengaku mulai merasa diteror setelah melaporkan cuitan Permadi Arya alias Abu Janda di Twitter yang menyebut Islam adalah agama arogan di Indonesia ke Bareskrim Polri, Kamis (28/1). Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyarankan, jika benar Ketua KNPI Haris Pertama merasa mendapatkan teror, segera melaporkan kejadian itu ke polisi.

“Jika Haris merasa terancam dan butuh perlindungan negara sebagai pelapor sebuah tindak pidana, bisa mengakses haknya sesuai perundang-undangan untuk mengajukan perlindungan ke LPSK,” kata Nasution melalui siaran persnya, Senin (1/2).

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Ketua Umum KNPI Haris Pertama mengaku mengalami beberapa peristiwa yang dianggapnya sebagai teror dari orang tak dikenal usai melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.

Nasution menjelaskan, jika Haris Pertama mengajukan permohonan perlindungan, selanjutnya LPSK akan memproses permohonan tersebut dengan memerhatikan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU tersebut, subyek perlindungan yang diberikan LPSK, terdiri atas saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli.

“Dalam hal ini, Haris sebagai pelapor tindak pidana,” ujarnya.

Masih menurut Nasution, perlindungan yang diberikan negara bertujuan, agar saksi, korban, pelapor, bisa berperan membantu penegak hukum mengungkap sebuah tindak

pidana tanpa rasa takut atas adanya intimidasi maupun ancaman. “Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan LPSK sesuai ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban,” jelasnya.

Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban, lanjut Nasution, diberikan dengan syarat yaitu, antara lain sifat penting keterangan saksi dan/atau korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi dan/atau korban.

“Salah satu hak saksi dan korban yakni memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya,” ungkap Nasution. ● mei



IDN/ANTARA

KPK GELAR REKONSTRUKSI KASUS KORUPSI BANSOS

Tersangka Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kiri) dan pihak swasta Harry Sidabuke (kedua kanan) mengikuti rekonstruksi perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Senin (1/2). KPK menggelar rekonstruksi yang menghadirkan ketiga tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta pihak swasta Harry Sidabuke guna mengumpulkan bukti-bukti pendukung terkait dugaan korupsi bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

RAPAT KERJA KOMISI I DENGAN MENKOMINFO

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (tengah) mendengarkan paparan dari Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2). Rapat tersebut membahas laporan perkembangan transformasi digital dan penyusunan digital roadmap serta peran strategis Kemkominfo dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi Covid-19 gelombang kedua.

“Saya mencermati justru banyak kepala daerah yang dizalimi, karena masa jabatannya berkurang hanya demi ambisi pilkada serentak, yang kita tidak tahu apa manfaatnya dan keuntungannya sampai hari

ini. Korelasi linear efficiency cost pun kita belum temukan. Ini yang saya maksud, cacat bawaan demokrasi karena pemerintah yang tidak konsisten sikapnya,” tukasnya. ● han

Kronologi Pemukulan yang Dilakukan Nurhadi ke Petugas Tahanan KPK

JAKARTA (IM) – Terdakwa kasus korupsi Nurhadi memukul petugas tahanan KPK, Kamis (28/1) kemarin. Pemukulan itu terjadi saat petugas melakukan sosialisasi akan adanya renovasi rutan tersebut.

Kapolsek Setiabudi, AKBP Yogen Heroes Baruno, menjelaskan, asal mula pemukulan tersebut, saat itu petugas tengah melakukan sosialisasi terkait adanya renovasi di rutan, namun Nurhadi tidak terima dan memukul korban di atas bibir sebanyak satu kali.

“Kronologisnya pada saat itu lagi sosialisasi untuk renovasi ruangan, terus kemudian terlapor tidak mau, karena repot harus mindah-mindahin barang, tidak terima akhirnya melakukan pemukulan terhadap korban,” kata Yogen saat dikonfirmasi, Senin (1/2).

Akibatnya, korban mengalami luka dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sehari setelahnya. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan soal kasus itu.

“Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan ke tiga orang, saksi korban, dan ditambah dua saksi yang mengetahui kejadian. Kemudian kita sudah mintakan hasil visumnya kita tinggal tunggu hasil visumnya nanti seperti apa,” terangnya.

Disamping itu, polisi juga akan memeriksa Nurhadi sebagai terlapor dalam kasus pemukulan ini. Rencananya, Nurhadi akan diperiksa polisi pekan depan.

“Kita belum tahu kita belum pastikan karena dari penyidik melaporkan dulu hasil pemeriksaan saksi, kita naikkan penyidikan baru kita jadwalkan pemeriksaan. Yang pasti dalam minggu depan kita percepat,” terangnya.

Dalam kasus ini, Nurhadi dipersangkakan Pasal 351

105 Orang Meninggal Akibat Gempa M6,2 di Sulawesi Barat

JAKARTA (IM) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, Darno Majid melaporkan, sebanyak 105 orang meninggal akibat gempa bumi M6,2 di Sulawesi Barat (Sulbar). Rinciannya, sebanyak 95 orang meninggal di Mamuju dan 10 orang meninggal di Majene.

“Dari dampak bencana di Sulbar tersebut sebanyak 105 orang meninggal. Ada 95 orang meninggal di Mamuju dan 10 orang meninggal di Majene,” ungkap Darno dalam Focus Group Discussion (FGD) Gempa Bumi di Sulawesi Barat secara virtual, Senin (1/2).

Selain itu, BPBD juga mencatat ada 3.369 orang korban luka-luka. Rinciannya, yang mengalami luka berat 426 orang, luka sedang 240 orang, luka ringan 2.703 orang.

“Dinyatakan hilang 3 orang di kabupaten Majene, 2 orang meninggal di pengungsian karena sakit,” kata Darno.

Sebagai informasi, 4.604 personil timbangan yang terdiri dari 1.388 personil TNI AD, 95 orang dari unsur TNI AL. Kemudian daur unsur TNI AU sebanyak 88 orang, Polri sebanyak 744 orang,

KUHP soal penganiayaan dengan ancaman penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, sebelumnya menduga lainnya melakukan pemukulan karena petugas Rutan KPK lebih dulu melakukan provokasi. Menurutnya, kliennya bukan orang yang tempramental yang suka memukul seseorang.

Menanggapi itu, Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri pun menyayangkan apa yang disampaikan Maqdir selaku pengacara. Ali menduga bahwa Maqdir sengaja menggiring opini yang keliru terkait kejadian.

“Sebagai bagian dari penegak hukum sangat disayangkan jika Pak Maqdir mengklaim tidak tahu kronologis kejadian lalu berusumi dengan menduga-duga atas kejadian tersebut, terlebih sengaja menggiring publik dengan opini keliru soal kejadian dimaksud,” kata Ali dalam keterangannya, Minggu (31/1).

Menurutnya, akan lebih bijak jika Maqdir tidak mencampurkan antara dugaan perubatan yang dilakukan Nurhadi dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang disidangkan di pengadilan Tipikor.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan pihak petugas rutan KPK tersebut,” ujarnya.

Sekadar informasi, Nurhadi merupakan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA, yang saat ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung lama KPK, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan. Nurhadi diduga memukul salah seorang petugas Rutan KPK tempatnya ditahan. ● han

Pemerintah Daerah yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Tagana sebanyak 225 orang, dan Relawan 2.064 orang.

Saat ini pusat ekonomi di Sulbar telah kembali beroperasi diantaranya seperti Pasar, SPBU Pertamina, juga telekomunikasi.

“Kegiatan ekonomi sudah kembali beroperasi normal,” katanya.

“Jaringan telekomunikasi dan juga bahan bakar Pertamina juga sudah hadir dimana di hari kedua memberikan bahan bakar untuk segenap kegiatan tanggap darurat. Dan saat ini seperti tadi dilaporkan kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan kembali. Listrik sudah mulai berfungsi, jaringan telekomunikasi sudah kembali,” papar Darno.

Darno mengatakan rumah sakit juga telah beroperasi kembali meskipun masih ada bangunan yang mengalami kerusakan.

“Dan rumah sakit juga telah kembali berfungsi meskipun ada beberapa bangunan yang rusak tetapi sudah ditanggulangi dengan adanya Rumah Sakit lapangan dan tenda-tenda yang juga kita pisahkan-pisahkan. Sehingga, kita bisa memaksimalkan fungsi fungsi tanggap darurat termasuk aspek kesehatan dan lain-lain,” tegasnya. ● mei